

KARAWANG DARI MASA KERAJAAN SUNDA HINGGA MENJADI KABUPATEN

Nina Herlina

Guru Besar Ilmu Sejarah, Departemen Sejarah dan Filologi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang
E-mail: nina.herlina@unpad.ac.id

ABSTRAK. Nama Karawang semula dikenal sebagai nama sebuah pelabuhan Kerajaan Sunda yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Pelabuhan Karawang memiliki peran penting dalam perekonomian Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Sunda runtuh 1579, wilayahnya terbagi atas empat pusat kekuasaan yaitu, Banten, Sumedanglarang, Cirebon, dan Galuh. Karawang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang yang dianggap sebagai penerus Kerajaan Sunda. Sejak 1620 an, Kerajaan Mataram melakukan invasi ke Jawa bagian Barat sehingga Sumedanglarang berada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram. Akibatnya Karawang pun menjadi bawahan Kerajaan Mataram. Sultan Agung, penguasa Mataram, memerintahkan Rangga Gede, Raja Sumedanglarang untuk menyerahkan kekuasaannya atas daerah Karawang kepada Adipati Kertabumi IV. Pengangkatan Adipati Kertabumi IV sebagai Bupati Karawang tercantum dalam sebuah piagam *Pelat Tembaga Kandang Sapi Gede*. Masyarakat Karawang lebih mengenalnya sebagai Pelat Kuningan Kandang Sapi Gede. Dalam pelat tembaga tersebut tertulis pengangkatan dilakukan pada 10 mulud tahun alif yang bila dikonversikan menjadi tanggal 14 September 1633. Tanggal ini selanjutnya diputuskan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Pelabuhan Karawang; Kerajaan Sunda; Kerajaan Sumedanglarang; Kerajaan Mataram; Bupati Karawang; Pelat Tembaga Kandangsapi Gede.

KARAWANG SINCE THE SUNDA KINGDOM ERA UNTIL ITS TRANSFORMATION INTO A REGENCY

ABSTRACT. *Karawang was originally the name of a port of the Sunda Kingdom on the northern coast of Java. The port played an important role in the kingdom's economy. After the kingdom collapsed in 1579, its former territory was divided into four centers of power: Banten, Sumedanglarang, Cirebon, and Galuh. Karawang became part of the Sumedanglarang Kingdom, regarded as the successor to the Sunda Kingdom. Beginning in the 1620s, the Mataram Kingdom launched military expeditions to western Java, eventually bringing Sumedanglarang under its influence. As a result, Karawang became a Mataram vassal. Sultan Agung, ruler of Mataram, instructed Rangga Gede, King of Sumedanglarang, to cede authority over Karawang to Adipati Kertabumi IV. The appointment of Adipati Kertabumi IV as Regent of Karawang is recorded in the Pelat Tembaga Kandang Sapi Gede Charter, better known among Karawang people as the Tembaga Kandang Sapi Gede Plate. The inscription states that the inauguration took place on the 10th day of the month of Mawlid in the year of Alif, corresponding to 14 September 1633 in the Gregorian calendar. The Government of Karawang Regency later designated this date as the official founding day of Karawang Regency.*

Keywords: Karawang Port; Sunda Kingdom; Sumedanglarang Kingdom; Mataram Kingdom; Karawang Regent; Kandangsapi Gede Copper Plate.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata dasar nama Karawang diambil dari bahasa Sunda yaitu *rawa* yang diberi imbuhan *ka-* dan *-an* sehingga terbentuklah kata *karawaan* yang memiliki makna *tanah rawa* (MvO Resident Krawang, A. Sangster, 31 Oktober 1931; Pemkab Karawang, 1975: 1; Syafruddin, 1987: 7). Dalam bahasa Sunda, sebuah kata yang diberi imbuhan seperti itu memiliki makna menerangkan suatu keadaan (Martasasmita, 1973: 14). Sumber lain menyebutkan bahwa Krawang berarti tanah yang terbagi atau penuh lobang. Berkaitan dengan nama Krawang, di daerah tersebut terdapat nama Ujung Krawang karena kalau dilihat dari laut,

pemandangan daerah tersebut menunjukkan banyak lobang (Memorandum by F. J. Valck, 5 Juli 1824).

Dari kata *karawaan* tersebut kemudian berubah menjadi *karawan* karena huruf vokal terakhirnya dibuang. Dalam bahasa Sunda, perubahan bunyi pada huruf terakhir dari *-n* menjadi *-ng* merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehingga kata *karawan* berubah menjadi *karawang* (Karima, 2003: 21; MvO Resident Krawang, A. Sangster, 31 Oktober 1931). Nama Karawang sudah dikenal setidak-tidaknya sejak abad ke-16 seiring dengan adanya berita dari orang-orang Portugis yang menyebut daerah ini dengan nama *caravan* atau *craavaon*. Kedua istilah tersebut merupakan pelapalan mereka

terhadap istilah *karawan* yaitu suatu daerah yang sebagian tanahnya berupa rawa. Dengan demikian, secara etimologis nama Karawang bukan berasal dari bahasa Portugis melainkan dari bahasa Sunda yang terkait dengan kondisi geografis wilayah tersebut.

Berdirinya Kabupaten Karawang tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik yang terjadi di Tatar Sunda yang terjadi pada akhir abad ke-16. Ketika Kerajaan Sunda masih berdiri, daerah Karawang merupakan salah satu wilayah kekuasaannya. Menurut kesaksian Tomé Pires, sejak 1513, Karawang merupakan salah satu dari tujuh pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Bagi Kerajaan Sunda, pelabuhan Karawang tidak hanya sekedar berfungsi sebagai pusat perdagangan melainkan juga berstatus sebagai pintu masuk wilayah pedalaman bagian timur kerajaan tersebut dengan menyusuri beberapa sungai besar, antara lain Citarum (Ekadjati, 1975: 97).

Dalam penelitian ini akan diuraikan perkembangan Karawang mulai dari Pelabuhan Kerajaan Sunda hingga akhirnya menjadi Kabupaten Karawang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957; Gottschalk, 1968). Tahap pertama, heuristik yaitu menelusuri dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Untuk memperoleh sumber yang otentik, dilakukan kritik eksternal sedangkan untuk memperoleh sumber yang kredibel, dilakukan kritik internal. Untuk memperoleh fakta sejarah, data yang sudah melalui tahap kritik, dikoroborasi dengan sumber pembanding yang tidak saling berkaitan. Fakta tersebut kemudian diinterpretasi, baik secara analisis maupun sintesis. Rangkaian fakta yang telah diinterpretasi secara logis, kemudian direkonstruksi menjadi historiografi tentang perkembangan Karawang dari Pelabuhan Kerajaan Sunda hingga menjadi Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan faktor terpenting bagi perkembangan perekonomian Kerajaan Sunda karena berbagai komoditas perdagangan dijual oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Akan tetapi, melalui perda-

gangan internasional itu pula, agama Islam mulai memasuki wilayah Kerajaan Sunda yang kemudian menjadi ancaman serius terhadap eksistensi kerajaan bercorak Hindu tersebut. Sejak 1479, agama Islam sudah masuk ke wilayah Cirebon sehingga wilayah tersebut menjadi daerah Kerajaan Sunda yang paling awal menerima pengaruh agama Islam. Dalam perkembangannya, Cirebon kemudian tumbuh menjadi pusat kekuasaan Islam di daerah pesisir Utara Kerajaan Sunda (Djajadiningrat, 1913: 73-74; van der Chijs, 1880:49; Hageman, 1867: 209-211). Pertumbuhan Cirebon sebagai pusat kekuasaan Islam melahirkan kekhawatiran di kalangan Raja Sunda karena dapat menghilangkan kekuasaannya di wilayah Tatar Sunda.

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Sang Ratu Jayadewata berupaya membatasi pedagang muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaannya. Upaya tersebut tidak mendatangkan hasil yang memuaskan sehingga Kerajaan Sunda mengutus Ratu Samiam ke Malaka untuk menjajagi kerja sama dengan Portugis (Atja, 1968: 75-76). Hasil dari penjajagan itu adalah sebuah perjanjian politik yang direalisasikan tanggal 21 Agustus 1522. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis akan membantu Kerajaan Sunda jika mendapat serangan dari Kerajaan Demak dan Cirebon beserta kerajaan sekutunya. Di lain pihak, pengaruh Islam di wilayah Kerajaan Sunda semakin menguat dan perjanjian dengan Portugis tidak dapat segera direalisasikan. Kekuasaan Raja Nusuya Mulya (1567-1579) pun semakin melemah sehingga ketika kerajaannya diserang oleh pasukan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf, Raja Sunda terakhir tersebut tidak dapat mempertahankan kekuasaan politiknya di wilayah Tatar Sunda.

Seiring dengan keruntuhan Kerajaan Sunda, di wilayah Tatar Sunda terdapat empat pusat kekuasaan baru, yaitu: Cirebon, Banten, Sumedanglarang, dan Galuh. Dari keempatnya, Galuh merupakan kerajaan paling lemah sehingga sejak 1595 berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram (ENI, Derde Deel 1911: 506). Sementara itu, dari keempat pusat kekuasaan politik tersebut, hanya Kerajaan Sumedanglarang yang menyatakan diri sebagai penerus Kerajaan Sunda. Prabu Geusan Ulun (penguasa Kerajaan Sumedanglarang) menyatakan diri sebagai "*nalendra*" atau penguasa di bekas wilayah Kerajaan Sunda. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Sunda kecuali Banten, Jayakarta, dan Cirebon (Surianingrat, 1983: 20). Berdasarkan cerita tradisi, pengakuan sebagai *nalendra* ditandai oleh penyerahan

mahkota emas Raja Sunda kepada Prabu Geusan Ulun oleh Sanghiang Hawu atau Jayaperkasa, Batara Dipati Wiradidjaja, Sanghiang Kondang-hapa, dan Batara Pancar Buana Terongpeot. Keempat orang tersebut merupakan *Kandaga Lante* (pejabat pemerintahan yang kedudukannya satu tingkat di atas *cutak/camat*) Kerajaan Sunda.

Seiring dengan keruntuhan Kerajaan Sunda, wilayah Karawang merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang. Meskipun demikian, pengaruh Cirebon sangat kuat di daerah ini sehingga sampai tahun 1619, daerah Karawang pun diklaim sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Sementara itu, pengaruh Mataram masuk ke wilayah Karawang melalui Kerajaan Sumedanglarang. Pada 1620, Pangeran Aria Suriadiwangsa I (penguasa Sumedanglarang) mengakui kekuasaan Mataram dan menyatakan pengabdiannya kepada penguasa Mataram. Setelah peristiwa ini, wilayah Sumedanglarang lebih dikenal dengan sebutan Priangan (Ekadjati, 1982: 257; Lubis, 1998: 30). Untuk menjalankan roda pemerintahan, Sultan Agung mengangkat Pangeran Aria Suriadiwangsa I sebagai wedana-bupati daerah Priangan dengan gelar Rangga Gempol I.

Berkaitan dengan itu, Karawang berstatus sebagai salah satu “kabupaten” di wilayah Priangan di bawah kekuasaan Rangga Gempol I. Pada saat itu, wilayah Karawang lebih dikenal dengan nama Rangka Sumedang. Sangat dimungkinkan kalau kekuasaan di daerah Karawang dipegang oleh pejabat setingkat “bupati” atau untuk menjamin loyalitasnya ke Mataram, Sultan Agung menempatkan seorang pejabat setingkat “duta” di wilayah Rangka Sumedang (Karawang) (van Rees, 1869: 15; Widjajakusuma dan Saleh, 1960: 65).

Kesultanan Banten pun memiliki ambisi untuk menguasai seluruh bekas wilayah Kerajaan Sunda. Ambisinya tersebut tertahan seiring dengan semakin menguatnya pengaruh Mataram atas Cirebon dan Priangan. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, penguasa Banten menjadikan daerah Karawang sebagai benteng pertahanan terdepan dalam menghadapi politik ekspansi Kerajaan Mataram. Meskipun daerah Karawang secara resmi masuk dalam wilayah pengaruh Mataram, namun pada kenyataannya pasukan Banten dengan leluasa bisa memasuki wilayah Karawang. Dalam rangka menjadikan Karawang sebagai benteng pertahanan terdepan, pada akhir abad ke-16, Pangeran Nagaragan dari Kesultanan Banten membangun sebuah kampung di sebelah Timur Citarum. Kampung baru yang diberi nama Hudong Udong (Udug Udug) tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal sang pangeran beserta

seluruh kawulanya (Memorandum by F. J. Valck, 5 Juli 1824).

Tindakan Pangeran Nagaragan tersebut mendorong Sultan Agung mengirim 1.000 cacah (termasuk di dalamnya tentara) ke Karawang di bawah pimpinan Aria Surengrono dari Wirasaba, sebuah wilayah yang sampai awal abad ke-19 masuk wilayah Keresidenan Surabaya. Aria Surengrono atau lebih dikenal dengan nama Aria Wirasaba, pergi ke Karawang dengan tugas utama mengusir Pangeran Nagaragan dari wilayah Karawang dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Dalam Memorandum F. J. Valck (Residen Karawang), peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1565 (Memorandum by F. J. Valck, 5 Juli 1824).

Untuk menjalankan perintah Sultan Mataram, berangkatlah rombongan Aria Wirasaba ke Karawang. Pada saat rombongan tiba di daerah Banyumas, Aria Wirasaba memutuskan membangun sebuah pemukiman dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi dengan Mataram. Setelah membuka perkampungan baru dengan menempatkan sekitar 300 cacah, Aria Wirasaba melanjutkan perjalannya ke Karawang dengan menyusuri aliran Citarum. Dalam perjalannya itu, Aria Wirasaba kembali membuka perkampungan di daerah Ciasem dan menempatkan sekitar 400 cacah. Sadar bahwa kekuatannya sudah berkurang, Aria Wirasaba tidak langsung melakukan serangan terhadap Pangeran Nagaragan di Hudong Udong melainkan terlebih dahulu membuka tiga buah perkampungan di Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Adiarsa (Safrudin, 1987: 59-60; Warliyah *et al.*, 2002: 16; Widjajakoesoema, 1937: 180). Ketiga perkampungan tersebut akan dijadikan sebagai pos pertahanan untuk menyerang Pangeran Nagaragan. Namun demikian, sampai tahun 1625 pasukan Mataram tidak berhasil mengusir pasukan Banten dari daerah Karawang karena kekuatannya hanya tinggal satu pertiga lagi. Serangan Aria Wirasaba terhadap Hudong Udong mengalami kegagalan dan selanjutnya ia bermukim di Adiarsa tanpa pernah melaporkan kegagalannya mengusir Pangeran Nagaragan kepada Sultan Mataram.

Oleh karena Aria Wirasaba tidak mampu mengusir Pangeran Nagaragan beserta pasukannya dan tidak melakukan kontak dengan Sultan Agung, penguasa Mataram itu memerintahkan Adipati Kertabumi III yang bergelar Singaperbangsa II dari Galuh pergi ke Karawang untuk membantu Aria Wirasaba. Untuk menjalankan perintah Sultan Mataram tersebut, Adipati Kertabumi III berangkat ke Karawang dengan kekuatan 1.500 cacah yang didukung oleh sekitar

1.000 prajurit. Selain itu, dalam menjalankan perintah Sultan Agung tersebut, Adipati Kertabumi III didampingi pula oleh Dalem Kanduruan Tambakbaya dari Galuh dan beberapa umbul dari Sukakerta, Cihaurbeuti, Cirebon, dan Parakanmuncang (Warliyah *et al.*, 2002: 16). Setibanya di sana suatu perkampungan dibuka di aliran sungai Citarum sebagai realisasi perintah Sultan Mataram membuka koloni di daerah Karawang. Pada saat membuka daerah pemukiman, di daerah tersebut banyak ditemukan pohon Nagasari (Memorandum by F. J. Valck, 5 Juli 1824).

Dengan kekuatan militernya itu, Adipati Kertabumi III berhasil mengusir Pangeran Nagaragan dari wilayah Karawang. Pembesar Banten itu mundur ke wilayah kerajaannya di seberang Citarum dan membuka sebuah perkampungan baru yang dinamai Pamoyongan atau dikenal juga dengan nama Babakan Banten (Warliyah *et al.*, 2002: 16).

Di perkampungan baru ini, Pangeran Nagaragan melanjutkan usahanya menjadikan daerah Karawang sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Setelah berhasil mengalahkan Pangeran Nagaragan, Adipati Kertabumi III memutuskan untuk sementara waktu tinggal di Rangka Sumedang. Seluruh pengikut Pangeran Nagaragan yang masih tinggal di Hudong Udong diampuni selama mereka menunjukkan sikap loyalitas kepada Adipati Kertabumi III. Pengampunan itu mengakibatkan bertemunya dua kebudayaan dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, mudahlah dipahami kalau di daerah tersebut terjadi percampuran tradisi Sunda Priangan dengan Sunda Banten.

Sementara itu, di kampung Pamoyanan, Pangeran Nagaragan menyusun rencana untuk menyerang balik Adipati Kertabumi III. Akan tetapi, serangan tersebut tidak pernah terwujud karena dalam sebuah pertempuran singit di sekitar Sungai Cibeureum, Adipati Kertabumi III beserta pasukannya berhasil membunuh Pangeran Nagaragan beserta para prajuritnya. Mayat-mayat dari pasukan Pangeran Nagaragan banyak yang dihanyutkan ke sungai dekat Pamoyanan sehingga air sungai tersebut berubah warna menjadi merah. Berkaitan dengan itu, penduduk setempat menamai sungai tersebut Cibeureum.

Sebagai bukti bahwa Pangeran Nagaragan telah dikalahkan, Adipati Kertabumi III memenggal kepala pangeran dari Banten itu dan mempersembakkannya kepada Sultan Mataram. Selama kepergiannya ke Mataram, tugas menjaga ketertiban di Karawang diserahkan kepada Dalem Kanduruan Tambakbaya. Keberhasilan menjalankan perintah Sultan Agung, Adipati

Kertabumi III dianugerahi keris yang diberi nama *Karosinjang* oleh penguasa Mataram. Selain itu, Sultan Agung pun memerintahkan dirinya untuk tetap memegang kekuasaan di Karawang sebagai wakil dari Sultan Mataram (de Haan, 1912: 161; Memorandum by F. J. Valck, 5 Juli 1824; Widjajakoesoema, 1937: 181). Akan tetapi, Adipati Kertabumi III tidak dapat menjalankan tugas sebagai penguasa di Karawang karena keburu meninggal dunia di Galuh dalam perjalannya kembali ke Karawang. Untuk sementara waktu, di Karawang terjadi kekonsongan kekuasaan karena Sultan Agung lebih berkonsentrasi untuk melancarkan serangannya ke Batavia.

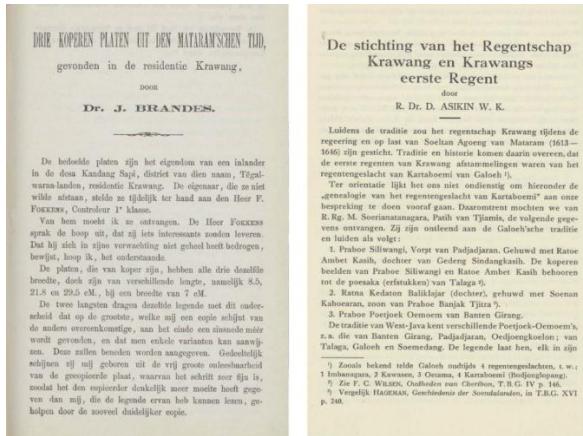
Pada saat daerah Karawang telah berhasil diamankan dari rongrongan Banten, Sultan Agung meneruskan rencana penaklukan Batavia. Di bawah kepemimpinan Dipati Ukur, Wedana-Bupati Priangan (1625-1629) dan Tumenggung Bahureksa, tentara Mataram menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Akan tetapi, para prajurit Mataram gagal mewujudkan ambisi Sultan Mataram tersebut. Kegagalan tersebut dipandang penguasa Mataram karena terjadi pengkhianatan oleh Dipati Ukur. Merasa dikhianati, Sultan Agung memerintahkan untuk menangkap Dipati Ukur dan setelah tertangkap penguasa Tatar Ukur itu dihukum mati. Sultan Agung kemudian mereorganisasi Tatar Ukur dengan membagi wilayah tersebut menjadi tiga kabupaten, yaitu: Bandung, Parakanmuncang, dan Sukapura (de Graaf, 1990: 149-168; Lubis, 1998: 31).

Selain itu, membagi wilayah Tatar Ukur menjadi tiga kabupaten, Sultan Agung pun memecah wilayah Kabupaten Sumedang menjadi dua bagian. Daerah Sumedang bagian Utara dijadikan sebagai wilayah setingkat kabupaten dengan nama Kabupaten Karawang. Sultan Agung memerintahkan Rangga Gede untuk menyerahkan kekuasaannya atas daerah Karawang kepada Adipati Kertabumi IV dengan gelar Raden Adipati Singaperbangsa III (anak Adipati Kertabumi III). Dilihat dari silsilahnya, antara Adipati Kertabumi IV dan Rangga Gede masih menunjukkan satu garis keturunan karena keduanya keturunan Prabu Geusan Ulun, penguasa Kerajaan Sumedanglarang (lihat silsilah Adipati Kertabumi).

Plat Kuningan Kandangsapi Gede

Mengenai berdirinya Kabupaten Karawang dan pengangkatan Adipati Kertabumi IV sebagai penguasa Karawang tercantum dalam sebuah piagam *Pelat Tembaga Kandang Sapi Gede*. Masyarakat Karawang lebih mengenalnya sebagai Plat Kuningan Kandang Sapi Gede.

Informasi awal tentang Pelat Tembaga Kandang Sapi dapat dibaca dalam artikel yang ditulis Dr. J. Brandes, yang berjudul *Drie Koperen Platen uit den Mataram'schen Tijd, Gevonden in de Residentie Krawang* (Tiga pelat Tembaga dari Masa Mataram yang ditemukan di Keresidenan Krawang) dalam *TBG*, Deel XXXII, 1889. Hampir setengah abad kemudian terbit artikel yang ditulis oleh Dr. Djenal Asikin Widjajakusumah yang berjudul *De Stichting van het Regentschap Krawang en Krawangs eerste Regent* (Berdirinya Kabupaten Krawang dan Bupati-bupati Pertama Krawang) dalam *TBG*, Deel LXXVII, 1937. Seperti ini tampilan halaman pertama kedua artikel tersebut:



Gambar 46: Artikel Sejarah Karawang karya Dr. J. Brandes dan Dr. Asikin.

Sumber: *TBG*, Deel XXXII, 1889; *TBG*, Deel LXXVII, 1937.

Pada bagian awal artikel Brandes menjelaskan apa yang disebut Tiga Plat Tembaga yang ditemukan di Keresidenan Krawang (terjemahan):

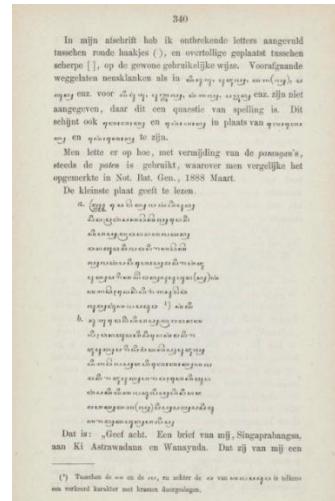
Plat-plat tembaga tersebut ditemukan di tanah milik seorang pribumi di Desa Kandangsapi, Distrik Tegalwarna, Keresidenan Krawang. Pemilik tanah tempat ditemukannya plat-plat tersebut untuk sementara menyerahkannya kepada F. Fokkens, Kontrolir Kelas 1.

Dari dirinya lah, saya (Brandes) memperoleh plat-plat tersebut. Fokkens berharap plat-plat tersebut akan memberikan sesuatu (informasi) yang menarik. Demikian pula harapan saya.

Plat-plat tersebut semuanya terbuat dari tembaga dengan masing-masing memiliki panjang: 8,5 cm, 21,8 cm, dan 29,5 cm. Lebar masing-masing 7 cm.

Jadi jelas bahwa pada tahun 1888 Brandes mendapatkan tiga buah pelat perunggu dari F Fokkens, Kontrolir Kelas 1. Pelat perunggu

tersebut diserahkan oleh seorang pribumi yang menemukan pelat tersebut di tanah miliknya di Desa Kandang Sapi, Distrik Tegalwarna Keresidenan Karawang kepada F Fokkens. Jadi faktanya pelat itu bukan kuningan tapi perunggu. Masyarakat awam waktu itu, mungkin tidak bisa membedakan mana yang kuningan mana yang perunggu dan logam kuningan mungkin lebih akrab di telinga mereka sehingga menyebutnya pelat kuningan. Menurut Brandes tiga pelat itu ukurannya berbeda-beda ada yang kecil ada yang besar. Ternyata pelat perunggu yang besar itu , berisi tulisan aksara Jawa, yang berbunyi sebagai berikut: (dialihaksarkan dari aksara Jawa ke huruf latin).



Gambar 47: Transkripsi *Plat Kuningan Kandangsapi Gede* karya Brandes.

Sumber: *TBG*, Deel XXXII, 1889.

Mangka emut kana piagem Kanjeng ka Ki Rangga Gede ti Sumedang, anu dititipkeun ka Ki Astrawadana. Anu matak manehna mawa piagem, lantaran manehna (Astrawadana) ngemban tugas ngareksa tanah kagungan Ratu "Nagara Agung". Eta kaprabon beulah kulon diwatesan ku Cipamingkis jeung beulah wetanna ku Cilamaya. Saterusna Astrawadana kudu nungguan lumbung pare, anu eusina aya lima tangkes tilu belas jait. Eta pare engkena kudu diangkut ku Singaperbangsa, saupama parentahna geus katarima. Eta surat parentah tea baris disanggakeun ku Ki Yudabangsa jeung Ki Wangsataruna, anu ayeuna aya di satengahing jalan mawa jalma reana dua rebu. Eta jalma anu dua rebu tea baris dicangking ku Singaperbangsa jeung Ki Wirasaba sacara wadana. Duanana geus diangkat ku Ratu. Upama surat angkatana geus beunang, maranehna kedah dipernahkeun di Waringin Pitu jeung Tanjungpura. Tugasna

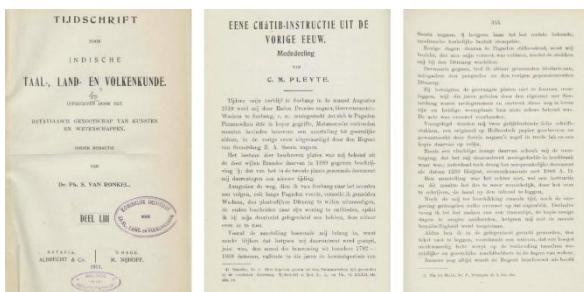
ngajaga Nagara Agung ti beulah kulon (bisi aya musuh). Ieu piagam ditulisna poe Rebo tanggal sapuluh Mulud tahun Alif. Anu nulisna, Anggaprana. (Widjaja-koesoema, 1937: 185-186.)

Terjemahan piagam tersebut adalah sebagai berikut.

Maka, ingatlah piagam Kangjeng kepada Ki Rangga Gede dari Sumedang, yang dibawa oleh Ki Astrawadana. Adapun maksud dia membawa piagam, karena (Ki Astrawadana) dia mengembangkan tugas menjaga wilayah kekuasaan Raja "Nagara Agung". Wilayah itu dibatasi oleh Cipamingkis di sebelah Barat dan Cilamaya di sebelah Timur. Seterusnya, Ki Astrawadana harus menunggu lumpong padi, yang isinya sebanyak *lima tangkes tiga belas jait*. Nantinya, padi itu harus diangkat oleh Singaperbangsa, jika perintah sudah diterimanya. Surat perintah itu akan diserahkan oleh Ki Yudabangsa dan Ki Wangsataruna, yang saat ini sedang dalam perjalanan sambil membawa 2.000 orang. Orang sebanyak itu akan diserahkan kepada Ki Singaperbangsa dan Ki Wirasaba yang telah diangkat sebagai wedana. Kedua orang itu telah diangkat oleh Raja. Jika surat pengangkatannya telah diterima, keduaanya harus diempatkan masing-masing di Waringinpitu dan Tanjung-pura. Tugasnya menjaga Nagara Agung dari sebelah Barat dari ancaman musuh. Piagam ini ditulis hari Rabu, tanggal sepuluh Mulud, tahun Alif. Yang menulis piagam ini adalah Anggaprana.

Tanggal 10 mulud tahun alif, telah dianalisis secara teliti oleh Brandes dan dilanjutkan oleh Asikin, menentukan bahwa berdirinya Kabupaten Karawang adalah tahun 1633.

Dalam tulisan C.M Pleyte, yang tampilkannya seperti ini:



Sumber: Collectie van KITLV, Leiden Rijks Universiteit.

Terjemahan:
INSTRUKSI KHATIB ABAD SILAM
Oleh: C.M. Pleyte

Sewaktu saya berada di Subang pada bulan Agustus 1910 saya diberi tahu oleh Raden Prawiranagara, Wadana Pemerintah di Subang, a.l. bahwa di Pamanukan Pagaden ada yang patut dilihat, yakni tiga piagam Mataram pada lempengan tembaga berukir serta surat pengangkatan pejabat keagamaan di sana pada abad silam yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang R.A. Surianagara.

Keberadaan lempengan-lempengan yang disebutkan di sini saya ketahui dari uraian yang diberikan oleh mendiang Brandes pada 1889; sedangkan keberadaan dokumen yang disebutkan kemudian merupakan kabar baru.

Karena jalan yang akan saya lalui dari Subang ke utara juga melewati Pagaden, maka saya meminta kepada Wadana agar memerintahkan Demang setempat untuk mengundang dengan hormat orang-orang tua ke rumahnya, sehingga saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan mereka di sana dalam perjalanan saya.

Saya tertarik terutama oleh pengangkatan pejabat tersebut, karena jika ternyata apa yang diberitahukan kepada saya memang benar, maka pengangkatan tersebut niscaya dilakukan antara tahun 1792 dan 1808, yakni masa jabatan Surianagara, sehingga dokumen itu merupakan surat keputusan berstempel menyangkut kepenghuluan Islam tertua yang diketahui sejauh ini.

Beberapa hari kemudian, ketika saya singgah di Pagaden, saya diberitahu bahwa permintaan saya telah dipenuhi, dan dokumen tersebut sudah menanti saya di tempat Demang.

Mereka mengatakan bahwa pelat tembaga yang diminta tidak dapat diperlihatkan karena telah dibawa oleh pemiliknya ke Sumedang bertahun-tahun silam, dan belum diketahui secara pasti apakah dia masih hidup dan di mana tempat tinggalnya saat ini. Adapun akta itu tersedia.

(terjemahan Dr. Hawe Setiawan, diakses dari FB Hawe Setiawan, pada tanggal 18 Juli, pk 12.02).

Dari tulisan Pleyte tersebut dapat diketahui bahwa tiga pelat tembaga yang disebut Brandes telah dititipkan kepada Fokkens, dan dilihat oleh Brandes, telah diambil oleh pemiliknya dan dibawa ke Sumedang. Hingga kini

tidak diketahui lagi keberadaan tiga pelat tembaga tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1968, Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk panitia untuk melakukan penelitian tentang sejarah Hari Jadi Karawang. Panitia tersebut meneliti tulisan Brandes dan tulisan Asikin Widjajakusumah, serta menperhatikan angka tahun di batu nisan makam Singaperbangsa di Manggung Ciparage Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya tertulis 1633-1677. Panitia juga membaca naskah Babad Karawang karya Mas Sutakarya, tertulis tahun 1633 sebagai tahun berdirinya Kabupaten Karawang. Panitia kemudian mengkonversi 10 mulud tahun alif menjadi tanggal 14 September 1633 atau 10 Rabiul awal tahun 1043 Hijriyah, atau Rabu 10 Mulud 1555 tahun Jawa Islam. Pemerintah Kabupaten Karawang memutuskan tanggal 14 September 1633 sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang (Pemerintah Kabupaten Karawang, diakses dari <https://www.karawangkab.go.id>, tanggal 28 Juni 2024, pk 19.55).

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin W.K., R. Dr. D. (1937). "De stichting van het Regentschap Krawang en Krawangs eerste Regent", dalam *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Deel LXXVII. Hlm. 178-205. Batavia: Albrecht & Co.
- Atja. (1968). *Tjarita Parahijangan*. Bandung: Jajasan Kebudayaan Nusantara.
- Brandes, Dr. J. (1889). "Drie Koperen Platen uit den Mataram'schen Tijd, Gevonden in de Residentie Krawang", dalam *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Deel XXXII. Hlm. 339-362. Batavia: Albrecht & Co.
- Cortesao, Armando. (1944). *The Summa Oriental of Tome Pires: An Account of the East*. Seri Ke-2 Jilid XXXIX dan XL. London: Hakluyt Society.
- de Graaf, H. J. (1990). *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung*. Terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- de Haan, Frederick. (1910-1912). *Priangan; De Preanger Regentschappen onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. I-IV. Batavia: BGKW.
- Danasasmita, Saleh. (1984). *Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat*. Bandung: Pemda Jawa Barat.
- Djajadiningrat, R. A. Hoesein. (1913/1983). *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter Kenstscheteing van de Javaansche Geschiedschrijving*. Leiden: John Enschede en Zenen.
- Ekadjati, Edi S. (1975). "Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat" dalam Saleh Danasasmita. *Sejarah Jawa Barat: Dari Masa Prasejarah hingga Masa Penyebaran Agama Islam*. Bandung: Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat.
- . (1982). *Ceritera Dipati Ukur*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Encyclopaedie van Nederlandsch Indie (ENI)*. Derde Deel. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Garraghan, Gilbert J. 1946. *A Guide to Historical Methods*. Fordham Unibversity Press.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah* (terj.). Jakarta: UI Press.
- Hageman, J. (1867). "Geschiedenis der Soendalanden". *TBG*. XVI.
- Karima, Rif'atin. (2003). *Padi dan Kesejahteraan Petani di Keresidenan Krawang (1900-1940)*. Skripsi. Bandung: Fakultas Sastra Unpad.
- Lubis, Nina H. (1998). *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Lubis, Nina Herlina et al. (2003). *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I dan II. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Lubis, Nina Herlina; Adeng; Etty Saringendyanti; Awaludin Nugraha; Miftahul Falah; & Iim Imanudin. (2011). *Sejarah Kabupaten Karawang*. Karawang: Disbudpar Kabupaten Karawang.
- Martasasmita, R. Ahmad. (1973). *Karawang Ngadeg Naléndra*. Karawang: Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Dati II Karawang.
- Memorie van Overgave Resident Krawang, A. Sangster, 31 Oktober 1931. *Reel No. 3 Serie 2e*. Jakarta: ANRI
- Memorandum by F. J. Valck, 5 Juli 1824. "Memorie Van Aanmerkingen, Behoort

- Bij Den Staat La E No. 2 Kolom 5-7".
Bundel Krawang No. 2. Jakarta: ANRI.
- Pemda Kabupaten Dati II Karawang. Kantor Departemen Penerangan. (1975). *Ringkasan Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang.* Karawang: Seksi Penerbitan dan Pembukaan Pameran.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto *et al.* (1990). *Sejarah Nasional Indonesia.* Jilid II, IV, dan VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Safrudin, Endang. (1987). *Tumbuh dan Berkembangnya Kabupaten Karawang sampai masa Bupati R. A. Singaperbangsa, 1633-1677.* Skripsi. Bandung: Fakultas Sastra Unpad.
- Surianingrat, Bayu. (1983). *Kabupaten I Bhumi Sumedang 1550 – 1950.* t.t.: t.p.
- van der Chijs, J. A. (1880). *Babad Tanah Pasundan.* Terj. R. Karta Winata. Batavia.
- van Rees, Otto. (1869). *Overzigt van Geschiedenis der Preanger Regentschappen.* Batavia: BGKW.
- Warliyah, U. *et. al.* (2002). *Sejarah Perjuangan Masyarakat Kabupaten Karawang dan Sekitarnya Periode 1945-1950.* Karawang: Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Widjajakoesoema, R. D. Asikin. (1937). "De Stichting van het Regentschap Krawang en Krawangs Eerste Regent. *TBG.* Deel XXXVII. Batavia: Albrecht & Co.
- Widjajakusuma, R. A. D. dan R. Mohamad Saleh. (1960). *Rutjatan Sadjarah Sumedang sarta nepi ka Tjampurna Djeung Kumpeni.* Bandung: Dana Guru.